JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK TANI MEKAR SARI II DI DESA PELANJUNGAN SARI KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Marhamah[1], Reno Afrian[2], M. Husaini[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: marhamahrakha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II yang ditandai dengan belum adanya perencanaan kegiatan secara terstruktur, rendahnya peran ketua kelompok dalam meningkatkan partisipasi anggota, serta belum dilaksanakannya evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan berjumlah 13 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal. Pada aspek *enabling*, pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi anggota masih rendah. Pada aspek *empowering*, penyediaan kebutuhan belum memadai meskipun kesempatan berpartisipasi telah tersedia. Pada aspek *protecting*, perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan petani belum terlaksana secara maksimal. Faktor pendukung meliputi budaya bertani dan kesamaan tujuan, sedangkan hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani, Mekar Sari II

ABSTRACT

This study was motivated by the suboptimal implementation of community empowerment through the Mekar Sari II Farmers Group, as reflected in the absence of structured activity planning, the limited leadership role in encouraging member participation, and the lack of evaluation to identify farmers' needs and problems. The research aimed to analyze community empowerment through the Mekar Sari II Farmers Group in Pelanjungan Sari Village, Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency. A descriptive qualitative approach was employed. Thirteen informants were selected using purposive sampling. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing. Data credibility was ensured through prolonged engagement, persistent observation, triangulation, negative case analysis, reference materials, and member checking. The findings indicate that community empowerment has not been implemented optimally. In the enabling aspect, efforts to develop farmers' potential and encourage participation remain limited. In the empowering aspect, the provision of community needs has not been adequate despite available participation opportunities. In the protecting aspect, safeguarding and advocating farmers' interests have not been fully realized. Supporting factors include farming culture and shared objectives, while the main constraints are limited human resources and insufficient implementation time.

Keywords:. *Community Empowerment, Farmer Groups, Mekar Sari II*

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan Indonesia karena berperan sebagai penyedia pangan, sumber mata pencaharian masyarakat perdesaan, serta penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan kemajuan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat (Dekasari, 2016). Di sisi lain, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya penguasaan inovasi, keterbatasan akses informasi, lemahnya koordinasi antarpelaku, dan fluktuasi kondisi ekonomi yang berdampak pada produktivitas petani (Sawir, 2021). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam pembangunan pedesaan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengembangkan potensi, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup (Savitri & Andreas, 2016). Dalam sektor pertanian, implementasi pemberdayaan diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani sebagai media pembelajaran, kerja sama, komunikasi, dan penyebarluasan inovasi. Keberadaan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan anggota dalam mengembangkan usaha pertanian sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Fauziah et al., 2024).

Pemerintah telah memberikan landasan hukum melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur pembentukan, pembinaan, dan pengembangan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa kelembagaan petani memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan pertanian melalui peningkatan kapasitas organisasi, penguatan kerja sama, serta perluasan akses petani terhadap berbagai program pemerintah. Meskipun demikian, implementasi pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani di berbagai daerah masih belum berjalan secara optimal (Bahua, 2015). Berbagai kendala, seperti lemahnya kepemimpinan, rendahnya partisipasi anggota, kurangnya koordinasi, serta belum tersusunnya program kerja yang sistematis, menyebabkan tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai (Wakhid, 2016).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada Kelompok Tani Mekar Sari II di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kelompok yang dibentuk pada tahun 2017 dengan pendampingan Balai Penyuluhan Pertanian ini diharapkan menjadi wadah pengembangan kapasitas petani. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masih menghadapi beberapa permasalahan. Perencanaan kegiatan belum disusun secara terjadwal sehingga pertemuan sering dilaksanakan secara mendadak dan mengakibatkan rendahnya kehadiran anggota. Selain itu, penyampaian informasi belum menjangkau seluruh anggota karena komunikasi lebih banyak dilakukan kepada pengurus kelompok. Peran ketua kelompok dalam mengoordinasikan kegiatan, membangun motivasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat juga belum optimal. Di samping itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program belum dilakukan secara berkesinambungan sehingga berbagai kebutuhan maupun kendala yang dihadapi petani belum teridentifikasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan kapasitas petani, penerapan inovasi pertanian, serta pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani sangat dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan. Penelitian (Yanti, 2022) menemukan bahwa pemberdayaan pada Kelompok Tani Budi Karya di Desa Ampukung belum terlaksana secara optimal akibat tidak adanya perencanaan kegiatan yang terstruktur, rendahnya partisipasi anggota, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, penelitian (Sintia, 2020) mengenai pemberdayaan melalui Gapoktan Panca Tani di Desa Mlaten menunjukkan bahwa kelembagaan yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan usaha produktif, memperkuat administrasi organisasi, serta memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas pengelolaan organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan implementasi pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian. Meskipun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Penelitian Helda Yanti lebih menitikberatkan pada hambatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan rendahnya partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian Ninin Sintia berfokus pada keberhasilan pemberdayaan melalui Gapoktan sebagai organisasi yang memiliki struktur lebih luas dibandingkan kelompok tani. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji pelaksanaan pemberdayaan berdasarkan dimensi pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan kemampuan anggota, serta perlindungan terhadap kepentingan petani dalam konteks kelompok tani di tingkat desa.

Perbedaan karakteristik lokasi penelitian juga menjadi dasar penting dilakukannya kajian ini. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, sumber daya manusia, pola kepemimpinan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk implementasi pemberdayaan yang beragam. Desa Pelanjungan Sari sebagai salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan kelembagaan petani. Oleh karena itu, hasil penelitian pada daerah lain belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang terjadi pada Kelompok Tani Mekar Sari II sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan fenomena tersebut secara lebih mendalam.

Selain perbedaan lokasi, penelitian ini juga menawarkan perspektif analisis yang berbeda. Kajian dilakukan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto melalui tiga dimensi utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menganalisis pemberdayaan secara lebih menyeluruh, mulai dari upaya menciptakan iklim yang mendorong berkembangnya potensi masyarakat, peningkatan kapasitas melalui penyediaan berbagai sumber daya dan kesempatan, hingga perlindungan terhadap kepentingan kelompok yang menjadi sasaran program. Dengan menggunakan ketiga dimensi tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana proses pemberdayaan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Research gap penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang mengintegrasikan analisis terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani dengan mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat berdasarkan kondisi empiris di tingkat desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan keberhasilan ataupun kendala pelaksanaan program secara umum, sedangkan penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana hubungan antara kepemimpinan kelompok, perencanaan kegiatan, partisipasi anggota, pendampingan penyuluh, dan mekanisme evaluasi dalam memengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual kelembagaan petani.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan fisik maupun teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan masyarakat. Kelompok tani yang mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal akan menjadi sarana pembelajaran, komunikasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggotanya. Sebaliknya, apabila kelembagaan tidak berjalan secara efektif, berbagai program pemerintah berpotensi tidak memberikan dampak yang maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi antaranggota. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah, Balai Penyuluhan Pertanian, serta pengurus kelompok tani dalam menyusun kebijakan maupun program pemberdayaan yang lebih efektif. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan kegiatan, peningkatan kapasitas kepemimpinan organisasi, penguatan partisipasi anggota, serta pengembangan sistem evaluasi yang berorientasi pada kebutuhan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan kelompok tani dalam mendukung pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan sehingga memberikan informasi yang komprehensif mengenai proses, dinamika, serta berbagai faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2018).

Sumber informasi dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memahami pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan, arsip, profil organisasi, struktur kepengurusan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur,

observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan secara mendalam dari para informan mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas kelompok tani dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan, foto, serta dokumen lain yang relevan (Sugiyono, 2013).

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, serta mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar hubungan antar-temuan lebih mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan kondisi empiris (Sugiyono, 2014).

Keabsahan data dijamin melalui uji kredibilitas yang meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi sebagai pendukung temuan, serta member checking kepada informan. Penerapan berbagai teknik tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan kepercayaan yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sujarweni Wiratna, 2020).

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Mekar Sari II Di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Enabling
    a. Pengembangan Potensi

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan potensi petani telah terlaksana, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, anggota Kelompok Tani Mekar Sari II memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan pestisida, pupuk, serta pemanfaatan berbagai peralatan pertanian, seperti mesin pemotong rumput, mesin perontok, dan alat penyemprot. Informasi tersebut diperoleh melalui pendamping pertanian, penyuluh, ketua kelompok, maupun sesama anggota sehingga meningkatkan pemahaman petani dalam menerapkan teknik budidaya yang lebih efektif. Selain itu, keberadaan kelompok tani dipandang sebagai sarana pembelajaran yang mampu membantu anggota mengembangkan kemampuan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas petani, sejalan dengan pandangan Friedmann yang menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki sekaligus mendorong pengembangannya (Hendrawati Hamid, 2018).

    b. Mendorong Keikutsertaan Masyarakat

        Sebaliknya, indikator yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat belum menunjukkan hasil yang memadai. Hasil wawancara,

ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 2, 2026

observasi, dan dokumentasi mengungkapkan bahwa tingkat kehadiran anggota dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah karena pertemuan sering dilaksanakan tanpa perencanaan yang jelas dan tidak didukung jadwal rutin. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendadak sering kali berbenturan dengan aktivitas bertani maupun pekerjaan lainnya sehingga banyak anggota tidak dapat menghadiri penyuluhan atau pertemuan kelompok. Selain itu, penyampaian informasi masih dilakukan secara sederhana dari satu anggota kepada anggota lainnya sehingga tidak seluruh petani memperoleh informasi secara merata. Kondisi tersebut diperburuk oleh belum optimalnya peran ketua kelompok dalam mengoordinasikan waktu pelaksanaan, menyusun agenda kegiatan, serta mendorong keterlibatan anggota. Akibatnya, tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum dapat diwujudkan secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator *memotivasi atau mendorong keikutsertaan masyarakat* belum sesuai dengan konsep Friedmann yang menekankan pentingnya penciptaan iklim yang mampu mendorong masyarakat berperan aktif dalam setiap proses pemberdayaan (Sri Handini dkk, 2021).

2. Empowering
   a. Penyediaan Berbagai Kebutuhan

      Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan kebutuhan petani belum terlaksana secara optimal. Bantuan berupa benih padi, pupuk, pestisida, maupun sarana produksi lainnya masih bergantung pada alokasi anggaran desa dan proses pengajuan usulan sehingga penyalurannya sering mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kebutuhan petani belum dapat dipenuhi tepat waktu, terutama pada musim tanam. Selain keterbatasan anggaran, efektivitas penyaluran bantuan juga dipengaruhi oleh peran pengurus kelompok dalam mengoordinasikan pengajuan kepada instansi terkait. Akibatnya, hanya sebagian kebutuhan anggota yang dapat terpenuhi, sedangkan bantuan lainnya belum tersedia secara memadai. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa indikator penyediaan kebutuhan belum sepenuhnya sejalan dengan konsep Friedmann yang menekankan pentingnya dukungan nyata melalui penyediaan sumber daya untuk memperkuat keberdayaan masyarakat (Romadhon & Muhtadi, 2018).

   b. Pemberian Peluang Kepada Setiap Masyarakat

      Meskipun demikian, indikator pemberian kesempatan kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa Kelompok Tani Mekar Sari II menerapkan prinsip keterbukaan dengan memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk bergabung dan mengikuti setiap kegiatan tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin. Seluruh anggota memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, mengikuti penyuluhan, serta berpartisipasi dalam berbagai program kelompok sepanjang bersedia mematuhi ketentuan organisasi. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa kelompok tani telah menerapkan prinsip inklusivitas dalam pelaksanaan pemberdayaan sehingga sejalan dengan pandangan Friedmann yang menyatakan bahwa pemberian akses dan kesempatan yang setara merupakan bagian penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

3. Protecting
    a. Membela Kepentingan Masyarakat

        Ketua kelompok telah berupaya menjalankan tugasnya, namun pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pertemuan rutin, penyuluhan, dan evaluasi masih berlangsung secara terbatas. Kesibukan pengurus dalam pekerjaan utama menyebabkan koordinasi organisasi belum terlaksana secara maksimal sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani belum memperoleh tindak lanjut secara cepat. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan anggota belum sepenuhnya terakomodasi dalam kegiatan kelompok. Temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator pembelaan terhadap kepentingan masyarakat belum sesuai dengan konsep Friedmann yang menempatkan perlindungan terhadap kelompok sasaran sebagai unsur penting dalam pemberdayaan.

    b. Melindungi

        Permasalahan serupa juga terlihat pada indikator perlindungan terhadap kepentingan petani. Penanganan administrasi asuransi usaha tani yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko gagal panen belum dilakukan secara optimal karena proses pengurusannya relatif lambat. Meskipun kelompok telah melaksanakan upaya pencegahan melalui pengendalian hama secara bersama, mekanisme perlindungan terhadap kerugian yang dialami anggota masih belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan petani belum memperoleh jaminan perlindungan secara menyeluruh ketika menghadapi risiko usaha tani. Dengan demikian, indikator perlindungan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi konsep Friedmann yang menegaskan bahwa pemberdayaan harus disertai upaya melindungi kelompok yang memiliki keterbatasan agar mampu mempertahankan keberlangsungan kehidupannya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Mekar Sari II Di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
    a. Budaya Bertani

        Budaya bertani yang telah diwariskan secara turun-temurun menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar penduduk Desa Pelanjungan Sari telah lama menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian sehingga aktivitas bercocok tanam menjadi

bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membentuk sikap positif masyarakat terhadap keberadaan kelompok tani sebagai sarana pembelajaran, kerja sama, dan pengembangan kemampuan dalam bidang pertanian. Dengan demikian, budaya bertani yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Kesamaan Tujuan

Kesamaan tujuan antaranggota kelompok juga menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, seluruh anggota memiliki orientasi yang sama, yaitu meningkatkan hasil usaha tani, mengembangkan kemampuan, serta memajukan sektor pertanian di Desa Pelanjungan Sari. Kesamaan kepentingan tersebut mendorong terciptanya kerja sama, komitmen, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. Oleh karena itu, adanya tujuan bersama menjadi salah satu unsur yang mendukung efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II karena seluruh anggota memiliki motivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara kolektif.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Mekar Sari II. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengelolaan organisasi belum berjalan secara optimal karena ketua kelompok lebih memprioritaskan aktivitas pribadi dibandingkan tanggung jawab dalam mengoordinasikan kelompok. Kondisi tersebut berdampak pada belum tersusunnya perencanaan program, agenda kegiatan, maupun jadwal pelaksanaan secara sistematis. Akibatnya, berbagai kegiatan pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan pengembangan kapasitas petani belum tercapai secara maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

b. Waktu Pelaksanaan

Pengaturan waktu pelaksanaan juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pertemuan maupun penyuluhan sering dilaksanakan tanpa jadwal yang tetap sehingga pemberitahuan kepada anggota dilakukan secara mendadak. Pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan jam kerja petani menyebabkan banyak anggota tidak dapat meninggalkan aktivitas di lahan pertanian untuk mengikuti program yang diselenggarakan. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kehadiran masyarakat relatif rendah dan mengurangi efektivitas proses pemberdayaan (Saifuddin Yunus, Saudi dan Fadli, 2017). Oleh karena itu, penyusunan jadwal yang terencana dan disepakati bersama

menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang ada, maka dapat disimpulkan pada dimensi *enabling*, pengembangan kapasitas petani telah mengalami peningkatan, terutama dalam pemanfaatan peralatan pertanian dan penerapan penggunaan pupuk maupun pestisida secara tepat. Namun, keterlibatan anggota dalam kegiatan pemberdayaan masih rendah karena pelaksanaan program belum memiliki jadwal yang terencana dan sering dilaksanakan secara mendadak. Pada dimensi *empowering*, pemenuhan kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan bantuan sarana produksi, meskipun seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk bergabung dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Sementara itu, pada dimensi *protecting*, perlindungan terhadap kepentingan petani belum berjalan secara maksimal karena belum terselenggaranya evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota serta masih lambatnya penanganan administrasi asuransi usaha tani ketika terjadi gagal panen.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Unsur yang mendukung meliputi budaya bertani yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat serta kesamaan tujuan anggota dalam mengembangkan sektor pertanian. Sebaliknya, kendala utama berasal dari aspek sumber daya manusia, terutama belum optimalnya kinerja kepengurusan kelompok, serta pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan yang belum terjadwal dengan baik sehingga menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2013). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bahua, M. I. (2015). *Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani Indonesia*. Ideas Publishing.

Dekasari, D. A. (2016). Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *5*(1), 38–50. http://kompasiana.com

Fauziah, A., Primafira, A., Eka, B., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., Ketut Budaraga, I., Heryadi, D. Y., Pakpahan, H. T., & Kurniasih, S. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. CV HEI PUBLISHING INDONESIA. www.HeiPublishing.id

Hendrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.

Joko Sutarso dkk. (2018). Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Komunikasi, Organisasi, budaya, dan Politik. Purwokerto: FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

Romadhon, S., & Muhtadi, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani (Poktan) Tanaman Anggrek Parakan Jaya Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Agribisnis Terpadu, Desember*, *11*(2).

Saifuddin Yunus, Saudi dan Fadli. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Savitri, E., & Andreas. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*. First Grsphic.

Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. CV Budi Utama.

Sintia, N. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui GAPOKTAN Panca Tani Desa Mlaten Kecamatan Wijen Kabupaten Demak. *Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*.

Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfnbeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Mrebeta.

Sujarweni Wiratna V. 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU.Wakhid, A. A. (2016). *Administrasi Dan Pembangunan Nasional.* Harakindo Publishing.

Sri Handini dkk. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Surbaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Yanti, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Skripsi Sarjana Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: Tidak Terbit*, (2). https://doi.org/10.33998/jms.v3i1

Zubacdi. (2013). Pengembangan Masyarakat. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.